

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya: Pengantar

R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA.

Hak Asasi Manusia

Departemen Hukum Tata Negara

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Surabaya, 18 April 2008

Pokok Bahasan

- ❑ Konsep tanggung jawab Hak Ekosob (ps. 2:1)
 - ❑ Pendekatan dan Macam Hak Ekosob
 - ❑ Kasus-kasus Hak Ekosob
 - ❑ Justisiabilitas Hak Ekosob
 - ❑ Anggaran untuk Rakyat Miskin
 - ❑ Mekanisme Pemantauan Hak Ekosob
-

Pustaka

- ❑ Eide, Asbjorn (2001) "Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights", in Eide, Krause, Rosas, *ESC Rights: A Textbook*. Dordrecht: Martinus Nijhoff.
 - ❑ IHRIP-Forum Asia (2000) Circle of Rights: Economic, Social and Cultural Rights Activism, A Training Resource.
 - ❑ Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hak-Hak Manusia Yang Asasi untuk Memperoleh Jaminan Rasa` Aman dan Sejahtera dalam Kehidupan Ekonomi, Sosial dan Budaya*, paper tidak diterbitkan.
 - ❑ Wiratraman, R. Herlambang (2006) *Strategi Pemenuhan Hak Ekosob*, Kompas 21 Februari 2006.
-

Pengaturan Pokok Hak Ekosob

- ❑ UUD 1945
 - ❑ UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - ❑ UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*)
-

Pendekatan dan Macam Hak Ekosob

Pendekatan

- ❑ Apakah yang disebut *rights based approach* dalam *ESC rights*?
- ❑ Apakah yang disebut *generic obligations* dalam *ESC rights*?

Macam Hak Ekosob

- ❑ Apa saja yang termasuk hak ekosob? Mengapa disebut hak ekosob?
 - ❑ Bagaimana pengaturan hak ekosob dalam UUD 1945 dan UU HAM?
-

Hak Ekosob

- Hak pendidikan
 - Kesehatan
 - Pekerjaan layak
 - Perumahan
 - Air
 - Keamanan
 - Pangan
 - Sandang dst
-

-
- Pekerjaan yang layak
 - Pendidikan
 - Kesehatan
 - Jaminan sosial
 - Tempat tinggal/papan
 - Sandang
 - Pangan
 - Pelestarian seni/budaya
 - Hak untuk istirahat
 - Fasum → hak untuk penikmatan sosial (lingkungan, kebersihan, sanitasi).
 - Hak atas air, udara yang bersih dll.
-

Konsep Tanggung Jawab Hak Ekosob

- ❑ Bagaimana pengaturan dalam Konstitusi dan UU HAM?
- ❑ Bagaimana pengaturan dalam Kovenan Hak Ekosob?
- ❑ Elemen-elemen kewajiban negara Pasal 2 ayat:

(1). Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.

Justisiabilitas Hak Ekosob

- ❑ Apa yang disebut konsep justisiabilitas?
 - ❑ Apa bentuk nyata dalam kasus Hak Ekosob? Bisakah kasus pelanggaran Hak Ekosob dibawa ke pengadilan?
-

Anggaran untuk Rakyat Miskin

- Apakah ada hubungan antara kebijakan anggaran dengan upaya pemajuan hak ekososob?
 - Apakah ada sanksi/upaya penegakan hukum bila APBD tidak berpihak pada kebutuhan rakyat miskin?
-

Mekanisme Pemantauan

- Pelaporan secara berkala kepada CESCR (Committee on ESC Rights)
 - Non Governmental Network on ESCR (ESCR Net) → Pertemuan di Nairobi, Kenya Maret 2008 → Aplikasi Protokol Opsi untuk mekanisme pengaduan terhadap kasus pelanggaran Hak Ekosob.
-

Kasus Suyat

- ❑ Suyat, seorang anak 7 tahun dari keluarga miskin, tidak bisa sekolah karena tidak ada biaya. Terpaksa ia bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi kebutuhan makan, serta keperluan obat bagi ibunya yang sedang sakit-sakitan. Ia mendengar, gubugnya di pinggir kali Surabaya akan digusur lagi oleh Petugas Satpol PP.
 - ❑ Menurut anda, hak-hak dasar apa saja yang hilang dalam kasus tersebut?
 - ❑ Apa yang seharusnya dilakukan Pemerintah?
-

Hak-hak dasar Suyat yang hilang

1. Hak anak untuk berkembang (ps. 28B-2)
 2. Hak atas pendidikan dasar (ps. 28C, 31)
 3. Hak atas lingkungan yang sehat (ps. 28H-1)
 4. Hak atas tempat tinggal yang layak (ps. 28H-1)
 5. Hak atas pangan/kebutuhan dasar (ps. 28C-1)
 6. Hak atas pelayanan kesehatan (ps. 28H-1)
 7. Hak atas rasa aman dan tidak diperlakukan diskriminatif (ps. 28G-1)
 8. Hak atas jaminan sosial (ps. 28H-1, 34)
-

Kasus Ainil

- Ainil sudah 4 bulan ini bekerja sebagai PRT tidak tercatat di Serawak, tetapi belum mendapat upah karena dipakai untuk menebus pengirim jasa TKI. Ia, sebenarnya tidak tahan menjadi PRT karena perlakuan majikan yang menyiksa dan berulang kali memperkosanya. Ainil terpaksa menjadi buruh migran karena penghidupan tani orang tuanya dirampas akibat sawahnya dipakai lahan proyek Bendungan. Di saat pengusiran TKI ilegal, ia dilepas majikan dan terpaksa mengungsi di Nunukan. Tetapi sayang, ia meninggal di penampungan akibat tiadanya pangan dan sanitasi yang memadai. Ainil bukanlah pertama dan yang terakhir, ada 78 buruh migran/TKI lainnya pun juga mati.
 - Apa hak-hak dasar yang hilang dalam kasus Ainil?
-

Apakah sms ini kasus Hak Ekosob?

SMS: 08159108... (Jum'at, 18/04/08, 15.50)

- *Per 1 Mei, Lapindo menghentikan kewajibannya memberikan jatah nasi bungkus pada 2049 jiwa di pengungsian pasar Porong. Pemda juga cuci tangan. Ini sebagai langkah Lapindo memaksa warga menjual tanahnya kepada Lapindo dengan cara diangsur 20% dan tanpa kejelasan pembayaran 80%. Mohon dukungan pada korban.*
-